

REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON

Gicheel Aurelia Theresa Lenzun¹, Daisy Posumah², Trilke Erita Tulung³, Johnly Roycke Pangemanan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sam Ratulangi Manado

Email Korespondensi: posumah.daisy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and explore how female voters in Tomohon City interpret women's political representation in the Mayoral and Vice-Mayoral elections. Women's representation in politics has become a crucial issue as it relates to the fulfillment of political rights and the quality of local democracy. This research employs a qualitative approach with a phenomenological research type to delve into the deep experiences and perspectives of informants, with data collection techniques conducted through in-depth interviews. The results of the study indicate that the presence of women in the political contestation of Tomohon City is interpreted by female voters as a symbol of courage, authority, and moral quality. However, there is a shift in the expectations of female voters, where they desire female leaders who are stronger, more vocal, and substantive in the future. These findings emphasize that gender is no longer the sole determinant or guarantee of victory in politics; rather, evidence of real performance has become the primary consideration for female voters.

Keywords: Interpretation, Female Voters, Political Representation, Tomohon Regional Election.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami bagaimana pemilih perempuan di Kota Tomohon menginterpretasikan representasi politik perempuan dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Representasi perempuan dalam politik menjadi isu penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak politik dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi untuk menggali pengalaman dan sudut pandang mendalam dari para informan dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam kontestasi politik di Kota Tomohon dimaknai oleh pemilih perempuan sebagai simbol keberanian, wibawa, dan kualitas moral. Namun, ada pergeseran harapan pemilih perempuan, di mana mereka menginginkan sosok pemimpin perempuan yang lebih kuat, vokal, dan substantif di masa depan. Hasil ini mempertegas bahwa gender bukan lagi menjadi satu-satunya penentu atau jaminan kemenangan dalam politik, melainkan bukti kinerja nyata yang menjadi pertimbangan utama pemilih perempuan.

Kata kunci: Interpretasi, Pemilih Perempuan, Representasi Politik, Pilkada Tomohon.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam politik merupakan isu penting dalam pembangunan demokrasi. Keterlibatan perempuan dalam perpolitikan Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang lengkap, seperti UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016, serta ratifikasi Konvensi CEDAW. Namun, implementasi hukum ini sering kali berhadapan dengan hambatan kultural yang mengakar, di mana budaya patriarki menyebabkan laki-laki cenderung mendominasi. Tantangan budaya inilah yang kemudian diupayakan untuk diatasi melalui intervensi kebijakan afirmasi, khususnya kuota 30% keterwakilan perempuan. Tantangan terbesar representasi politik perempuan berada pada level eksekutif, di mana persentase kepala daerah perempuan di Indonesia pasca pelaksanaan pemilihan serentak tercatat masih jauh di bawah angka 10%.

Berbeda wilayah Indonesia yang lain, Kota Tomohon justru tampil sebagai anomali positif atau kasus unik dalam politik gender di Indonesia. Keunikan ini berakar pada budaya Minahasa yang lebih egaliter dengan falsafah "Si Tou Timou Tumou Tou". Menurut Imran dkk. (2023), nilai-nilai dalam falsafah ini secara inheren mengandung semangat kesetaraan yang memungkinkan perempuan di Sulawesi Utara untuk berkembang dan mengambil peran kepemimpinan tanpa dibatasi oleh sekat gender. Semua ini berawal setelah daerah ini dimekarkan dari Kabupaten Minahasa dan menjadi daerah otonom. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pertama tahun 2005, Tomohon langsung menorehkan sejarah yang luar biasa. Linneke Syennie Watoelangkow hadir sebagai figur perempuan yang tampil menjadi calon perempuan pertama dalam arena demokrasi lokal ini. Sejak Pemilihan pertama tersebut digelar pada tahun 2005 hingga kontestasi terbaru tahun 2024, Kota Tomohon menunjukkan konsistensi luar biasa dalam mengangkat perempuan sebagai aset politik vital yang kehadirannya selalu diperhitungkan.

Meskipun secara angka representasi perempuan telah terwujud, masalah penelitian ini adalah kurangnya data dan analisis kualitatif yang menjelaskan tentang representasi dari sudut pandang pemilih perempuan. Pemilih perempuan bukanlah objek yang pasif, tetapi merupakan subjek aktif yang memberi makna pada kehadiran representasi perempuan. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam akan interpretasi representasi politik perempuan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari sudut pandang pemilih perempuan di Kota Tomohon.

METODE

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yaitu Fenomenologi. Melalui lensa fenomenologi, penelitian ini berupaya menangkap dan menafsirkan "makna esensial" dari pengalaman hidup pemilih perempuan terkait representasi kandidat perempuan. Fenomenologi digunakan untuk menggali dan memahami bagaimana pemilih perempuan di Kota Tomohon menginterpretasikan representasi perempuan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon dengan meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Tomohon dengan informan utama pemilih perempuan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dan strategi Maximum Variation Sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik memilih individu yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Informan wajib diwakili dari dua kelompok utama: individu yang telah menjadi pemilih sejak Pilwako tahun 2005, 2010 atau 2015, serta pemilih muda berusia 18–25 tahun. Selain itu, penelitian ini melibatkan informan kunci dari kalangan kandidat perempuan dan pengurus inti organisasi perempuan di Kota Tomohon, dengan jumlah keseluruhan informan direncanakan 6 hingga 10 orang bergantung pada tercapainya kejenuhan data (data saturation).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara Mendalam (In-depth Interview) yang dirancang semiterstruktur untuk menggali pengalaman, perasaan, dan pemahaman informan secara personal. Panduan wawancara mencakup topik persepsi pribadi tentang kedudukan perempuan dalam politik, ekspektasi terhadap kandidat perempuan, hingga refleksi atas kesetaraan gender dan kepemimpinan di daerah.

Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis tematik (Thematic Analysis) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema dalam suatu data. Analisis tematik memiliki enam tahapan, yaitu melakukan pemahaman terhadap data yang akan dianalisis, membuat kode-kode untuk data, melakukan pencarian tema, meninjau kembali tema-tema yang sudah dibuat, pendefinisian dan pemberian nama tema, dan membuat hasil analisis (Braun & Clarke, 2006). Proses ini diarahkan pada kegiatan menyajikan data, mereduksi data, dan memverifikasikan data untuk menarik kesimpulan sehingga temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teori yang cocok untuk fondasi analisis ini adalah Teori Representasi Politik Hanna Fenichel Pitkin, yang menawarkan kerangka multidimensi untuk mengurai representasi tanpa mengabaikan konteks lokal, meskipun

memerlukan adaptasi terhadap dinamika Pilkada Indonesia yang dipengaruhi oleh patronase politik.

PEMBAHASAN

Kota Tomohon dicatat sebagai salah satu daerah di Sulawesi Utara yang memiliki riwayat panjang kehadiran perempuan dalam kompetisi politik lokal, termasuk dalam pemilihan legislatif dan eksekutif. Kondisi ini membentuk ruang sosial yang relatif lebih terbuka bagi aspirasi politik perempuan dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Sesuai dengan jenis penelitian fenomenologi, maka penelitian ini dilakukan melalui 6 tahapan analisa tematik dengan tahapan yang terakhir yaitu membuat hasil analisis dengan menafsirkan makna pengalaman informan dalam bingkai teori representasi Hanna F Pitkin (1967). Teori ini memiliki 4 dimensi representasi yaitu representasi simbolik, representasi deskriptif, representasi substantif, dan representasi formal. Representasi simbolik mengenai dampak psikologis atau sosiologis dari kehadiran perempuan dalam politik terhadap masyarakat khususnya pemilih perempuan. Representasi deskriptif terjadi ketika perempuan terlibat sebagai kandidat, baik secara fisik maupun simbolis. Sementara itu, representasi substantif didefinisikan bukan sebagai kesamaan fisik antara wakil dan yang diwakili, melainkan sebagai tindakan sang wakil dalam memajukan atau melayani kepentingan yang diwakilinya. Representasi substantif tercapai ketika perempuan secara aktif memperjuangkan isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka, seperti hak kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penghapusan kekerasan berdasarkan jenis kelamin. Lalu representasi formalistik adalah pandangan yang mendefinisikan representasi semata-mata berdasarkan aturan, prosedur, dan lembaga formal yang mendahului atau menyertai tindakan representasi. Keseluruhan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa makna yang muncul di benak pemilih perempuan mencakup seluruh spektrum representasi Pitkin (formal, deskriptif, simbolik, dan substantif). Menggunakan kacamata teori Hanna Pitkin, kita bisa melihat bahwa fenomena ini bergerak dari hal yang sifatnya formal menuju sesuatu yang sangat personal di benak pemilih.

Pertama, dari sisi formal dan deskriptif, masyarakat Kota Tomohon sebenarnya sudah "biasa" melihat perempuan berkompetisi di Pilkada sejak 2005. Kehadiran fisik dari para calon perempuan ini bukan lagi dianggap sebagai pelengkap kuota, melainkan sosok nyata yang memang mewakili gender pemilih perempuan. Tanpa disadari, representasi perempuan yang terjadi bertahun-tahun ini telah melakukan sosialisasi politik jangka panjang bagi warga Tomohon. Efeknya sangat luar biasa yang mana partisipasi perempuan di politik lokal Tomohon kini sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, bukan lagi sesuatu yang aneh. Interpretasi lebih dalam menunjukkan bahwa keterwakilan ini bukan sekadar pemenuhan kuota formal, melainkan sebuah transformasi struktur politik lokal. Dari sudut pandang fenomenologi, fakta empiris Kota Tomohon menunjukkan bahwa informan tidak hanya melihat perempuan sebagai calon, tetapi mengalami kehadiran perempuan melalui perasaan bangga, terharu, termotivasi, dan terlibat secara identitas. Penulis memaknai hal ini sebagai "politik kehadiran" (politics of presence), di mana pemilih perempuan melakukan internalisasi terhadap figur kepemimpinan perempuan sebagai cerminan diri mereka sendiri di ruang publik. Dengan demikian, makna konsistensi representasi perempuan dalam politik di Kota Tomohon bagi pemilih perempuan bukan semata-mata fakta objektif, melainkan pengalaman hidup yang direfleksikan (lived experience).

Kedua yaitu sisi keterkaitan dengan dimensi simbolik. Keterwakilan ini menimbulkan perasaan bangga dan terharu yang besar bagi pemilih perempuan. Ada semacam rasa pengakuan jati diri ataupun identitas ketika mereka melihat sesama kaum perempuan berdiri sejajar di panggung kontestasi politik. Bagi pemilih perempuan, representasi perempuan ini adalah simbol bahwa identitas mereka diakui dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini menjadi bukti bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya soal urusan teknis politik ataupun pemerintahan, melainkan soal harga diri kelompok yang selama ini mungkin merasa terwakili secara simbolis melalui sosok-sosok tersebut.

Namun, di balik representasi deskriptif, formal dan simbolik kini muncul sikap kritis dari pemilih perempuan terkait hasil kerja para pemimpin perempuan tersebut. Masyarakat mulai merasakan adanya kesenjangan antara banyaknya perempuan yang duduk di jabatan politik di Kota Tomohon dengan dampak kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh kaum perempuan di lapangan. Ada harapan besar yang belum sepenuhnya terjawab, terutama mengenai perlunya sosok pemimpin yang lebih berani

menyuarakan isu-isu spesifik perempuan serta menunjukkan integritas yang bersih. Pemilih perempuan di Kota Tomohon kini mulai membedakan antara kebanggaan melihat wajah perempuan dengan kebutuhan akan kinerja nyata.

Hasil penelitian ini benar-benar menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dimaknai sebagai keberanian, wibawa, dan kualitas moral. Makna ini menggeser stereotip tradisional yang sering kali menempatkan perempuan di posisi domestik, menjadi aktor yang memiliki otoritas politik. Selain itu, perempuan dianggap memiliki posisi yang semakin kuat dalam politik electoral di Kota Tomohon sehingga semakin percaya diri, dengan peluang politik lebih besar dibandingkan di masa lalu. Dengan alasan ini maka kota Tomohon menampilkan citra sebagai kota yang mendukung perempuan dalam politik, menjadikannya sebagai role model bagi daerah lain dalam hal pengarusutamaan gender di tingkat lokal.

Bagi para informan, kehadiran calon perempuan memunculkan perasaan bangga, terharu, dan menampilkan identifikasi gender secara bebas. Meskipun begitu, terdapat kesenjangan antara ekspektasi pemilih perempuan dan realitas representasi substantif. Penulis menginterpretasikan kesenjangan ini sebagai bentuk kritik terhadap kualitas keterwakilan di mana kehadiran fisik perempuan di kursi pemerintahan belum sepenuhnya diikuti oleh kebijakan yang secara spesifik menyoroti kepentingan perempuan. Sementara itu, budaya lokal menjadi pendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Nilai-nilai sosial masyarakat Tomohon yang cenderung terbuka memberikan legitimasi kultural bagi kepemimpinan perempuan, sehingga resistensi terhadap aktor politik perempuan sangat minim. Temuan faktual yang paling penting mendapati bahwa pemilih perempuan memiliki harapan akan pemimpin perempuan yang lebih kuat, vocal, dan substantif di masa depan.

Cara pandang ini yang baru ini mempertegas bahwa gender bukan lagi penentu atau jaminan kemenangan dalam kontestasi politik, karena kini yang dibutuhkan ialah bukti kinerja nyata. Melalui perspektif inilah, kita dapat melihat bahwa prinsip-prinsip politik egaliter telah lama meresap dan memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat kota Tomohon. Seperti jelaskan dalam literatur oleh Sari et al. (2020), egaliter adalah istilah yang menggambarkan individu dengan perilaku serta keyakinan yang menjunjung tinggi kesetaraan derajat manusia. Dalam konteks kota Tomohon, politik egaliter ini menemukan ruang tumbuhnya melalui budaya Minahasa yang cenderung terbuka dan menempatkan perempuan pada posisi yang setara dalam pengambilan keputusan. Lingkungan yang suportif ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam kancah politik Tomohon tidak lagi dipandang sebagai anomali atau hal yang tabu, melainkan telah bertransformasi menjadi representasi yang lumrah dalam praktik demokrasi lokal. Namun, jika kita melihat lebih dalam akan kontestasi politik kota Tomohon, muncul sebuah realitas yang kontradiktif. Meskipun pintu politik terbuka lebar, pasangan calon perempuan yang maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota sering kali menghadapi jalan terjal yang berujung pada kekalahan. Selama ini, figur perempuan di Tomohon lebih banyak berhasil dan terpilih ketika menempati posisi sebagai Wakil Walikota. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Tomohon sangat egaliter secara budaya, terdapat faktor-faktor eksternal yang sangat kuat memengaruhi preferensi pemilih, salah satunya adalah pengaruh partai politik.

Pemilih tidak hanya menilai sosok perempuannya secara personal, tetapi juga melihat bagaimana partai pengusung mengemas reputasi serta kekuatan politik calon tersebut secara luas. Peran partai pengusung atau koalisi nyatanya menjadi variabel penentu yang sangat krusial dalam mengonversi nilai egaliter menjadi kemenangan elektoral. Tanpa dukungan koalisi yang solid dalam strategi mobilisasi massa, figur perempuan di Tomohon akan sulit memaksimalkan potensi keterpilihannya. Apabila ditelaah lebih mendalam, terdapat keterkaitan antara modal elektoral partai pada Pemilu Umum dengan performa suara pasangan calon saat Pilkada. Secara normatif, kekuatan koalisi besar seharusnya berbanding lurus dengan kemenangan kandidat. Namun, sering terjadi pergeseran dukungan (voter turnout) yang mengakibatkan raihan suara pasangan calon perempuan merosot di bawah angka akumulasi partai yang mengusungnya.

Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam politik Tomohon, partai politik belum sepenuhnya mampu menjamin loyalitas pemilih ketika mengusung figur perempuan sebagai pemimpin utama. Kekalahan paslon perempuan sering kali disebabkan oleh kegagalan koalisi dalam membangun

kepercayaan pemilih bahwa figur tersebut memiliki kapasitas yang setara dengan dukungan kursi yang dimiliki. Pada akhirnya, perpaduan antara dukungan struktural partai dan pembuktian kredibilitas personal sang calon adalah dua faktor yang tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan perempuan di Kota Tomohon ke depannya tidak hanya bergantung pada narasi kesetaraan, tetapi pada kemampuan koalisi untuk memastikan bahwa suara yang mereka raih di Pemilihan Umum dapat dikonversi secara utuh menjadi dukungan bagi calon perempuan yang diusung dalam Pilkada.

KESIMPULAN

Interpretasi pemilih perempuan yang ada di Kota Tomohon terhadap representasi politik perempuan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan suatu cerminan dari kompleksitas antara representasi formal, deskriptif, simbolik dan substantif. Fenomena keberadaan calon perempuan dalam setiap kontestasi di Kota Tomohon sejak 2005, diinterpretasikan sebagai fakta historis yang membanggakan dan sarana inspirasi simbolik yang kuat karena Kota Tomohon telah menormalisasi partisipasi perempuan dalam politik lokal. Meskipun demikian, kebanggaan terhadap representasi ini diimbangi dengan tuntutan-tuntutan kritis yang menyoroti akan adanya kesenjangan antara kehadiran calon perempuan dengan kualitas kepemimpinan. Penelitian ini menemukan bahwa tingginya angka representasi perempuan secara deskriptif belum berbanding lurus dengan capaian kebijakan yang nyata. Hingga saat ini, belum ditemukan produk kebijakan spesifik yang dirasakan langsung dampaknya oleh kaum perempuan di Tomohon. Temuan ini menegaskan bahwa ke depannya, figur perempuan tidak boleh lagi sekadar menjadi pajangan gender, melainkan wajib memperkuat kapasitas kepemimpinan dan komitmen pada agenda publik yang bersih demi memenuhi ekspektasi pemilih yang mulai bersikap kritis terhadap efektivitas representasi.

REFERENSI

- Braun, V. & Clarke, V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology* 3(2), 77-101 (2006).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Faturrohman, F. (2023). Hambatan Struktural dan Kultural Representasi Perempuan dalam Pilkada Serentak di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*.
- Imran, T., dkk. (2023). The Meaning of Sitou Timou Tumou Tou as a Model of Women Empowerment Management in North Sulawesi. *Maker: Jurnal Manajemen*.
- Kemendagri (2021). *Laporan Kinerja Urusan Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Sari, N., Hasan, E., & Muliawati. (2020). Egalitarian culture perempuan Aceh. *Journal of Political Sphere (JPS)*, 1(2).